

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang berjudul “Kedudukan Opsir Cina dalam Pemerintahan Hindia Belanda di Batavia antara Tahun 1910-1942”. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan penelitian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan tersebut didasarkan pada temuan fakta-fakta dan analisis yang telah dikaji dan dipaparkan oleh peneliti. Berikut terdapat beberapa hal pokok yang telah peneliti simpulkan berdasarkan permasalahan yang telah dibahas.

*Pertama*, etnis Cina merupakan penduduk pertama yang mendiami Batavia yang baru dibangun oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen. Etnis Cina pertama yang ada di Batavia didatangkan oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen dari daerah Banten yang memang merupakan daerah koloni Belanda. Mereka didatangkan berserta pemimpin mereka yakni Souw Beng Kong. Etnis Cina memiliki sifat-sifat yang baik dalam kehidupan mereka seperti sifat ulet, rajin dan giat dalam melakukan pekerjaan mereka sehingga menjadikan mereka sebagai pengusaha-pengusaha ataupun pedagang yang sukses. Dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh mereka membuat pemerintah Hindia Belanda merasa tertarik untuk menjadikan mereka sebagai mitra dalam bidang perekonomian terutama bidang perdagangan. Dengan demikian mereka oleh pemerintah dijadikan pedagang perantara yang menghubungkan antara pemerintah Hindia Belanda dengan para petani pribumi.

Etnis Cina yang ada di Hindia Belanda khususnya yang berada di daerah Batavia mendapatkan berbagai keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Selain menjadikan mereka sebagai pedagang perantara, mereka pun diberikan beberapa hak istimewa yang diantaranya adalah hak untuk membeli berbagai trayek pajak yang diperjual-belikan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada setiap etnis Cina kaya. Dengan kekayaan yang dimiliki oleh mereka selain dapat mendapatkan berbagai trayek pajak, mereka juga dapat menempatkan dirinya dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda sebagai wakil dari

kelompoknya. Kekayaan yang banyak, perlakuan istimewa yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda dan juga didukung oleh kesuksesan yang diperoleh oleh mereka membuat mereka merasa superior dan memandang rendah penduduk pribumi.

Sikap angkuh dan superior yang memandang rendah penduduk pribumi membuat proses asimilasi diantara keduanya susah untuk dilakukan dan berlangsung alot. Mereka cenderung untuk bergaul dan berkomunikasi dengan kelompoknya sendiri dan lebih memilih untuk tinggal di daerah yang sudah disediakan oleh pemerintah Hindia Belanda khusus untuk etnis Cina yakni daerah Pecinan. Dengan begitu mereka hanya melakukan komunikasi dengan kelompoknya sendiri tanpa berusaha untuk melakukan asimilasi dengan penduduk pribumi. Sikap superior yang dimiliki oleh mereka serta keengganan mereka untuk melakukan asimilasi dengan penduduk pribumi, menimbulkan sikap anti Cina dalam diri penduduk pribumi. Sikap anti Cina yang ada pada diri penduduk pribumi diperkuat dengan adanya berbagai kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang bersifat diskriminasi.

*Kedua*, Pemerintah Hindia Belanda dalam menjalankan pemerintahannya di Batavia, mengeluarkan berbagai kebijakan terhadap penduduknya terutama etnis Cina. Pemerintah Hindia Belanda sangat membatasi gerak etnis Cina dalam dunia perdagangan, hal ini karena pemerintah Hindia Belanda melihat kesuksesan yang diperoleh oleh etnis Cina akan mengancam sistem monopoli yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu pemerintah Hindia Belanda merasa perlu untuk mengeluarkan serta menerapkan berbagai kebijakan terhadap mereka.

Kebijakan yang pertama dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda adalah dengan menerapkan kebijakan *Wijkenstelsel* yang mewajibkan setiap etnis Cina yang ada di Batavia untuk tinggal di tempat tertentu yang telah disediakan oleh pemerintah Hindia Belanda yang dikenal dengan Pecinan. Kebijakan kedua dengan mengeluarkan kebijakan *Passenstelsel* (Surat Pas) yang mewajibkan setiap etnis Cina yang akan melakukan perjalanan baik untuk kegiatan perdagangan ataupun kegiatan lainnya wajib membuat serta membawa surat pas yang mengurus oleh seorang kapiten Cina. Kedua kebijakan ini diberlakukan untuk

dapat mempermudah pemerintah Hindia Belanda dalam mengawasi kehidupan serta gerak-gerik etnis Cina.

Kebijakan selanjutnya yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam bidang kependudukan adalah dengan menggolongkan penduduk Hindia Belanda ke dalam tiga golongan penduduk. Golongan pertama adalah golongan Eropa atau Belanda (*Europeanen*) yang merupakan golongan penduduk paling tinggi kedudukannya, golongan kedua adalah golongan Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) yang terdiri dari orang Arab, India Cina dan orang Timur Asing lainnya yang menempati kedudukan kedua dalam struktur masyarakat Hindia Belanda dan golongan ketiga adalah golongan pribumi (*Inlanders*) yang menempati struktur masyarakat ketiga atau paling rendah. Dalam pelaksanaan kebijakan ini setiap tingkatan golongan dibedakan dalam masalah hukum dan kependudukannya dan kebijakan ini semakin menggambarkan adanya diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam menjalankan pemerintahannya terutama untuk penduduk pribumi.

Kebijakan dalam kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda adalah dengan mengeluarkan konsep *Nederlandschap* (Kebangsaan Belanda). Konsep ini mengakui bahwa setiap orang yang lahir di Hindia Belanda baik itu orang Eropa, keturunan Belanda, pribumi serta penduduk Timur Asing adalah berkebangsaan Belanda. Kebijakan ini tidak memberikan manfaat apapun terhadap penduduknya kecuali memberikan perlindungan hukum dan keamanan dari pemerintah Belanda apabila keluar dari wilayah Hindia Belanda. Kebijakan ini menyetarakan status hukum antara penduduk pribumi dan etnis Cina, dan hal ini dipandang sebagai tindakan yang semena-mena oleh etnis Cina karena mereka menganggap derajat mereka lebih tinggi dibanding penduduk pribumi.

Kebijakan lainnya adalah dengan menerapkan kebijakan Kawula Belanda (*Wet op Het Nederlandsch Onderdaanschap*), kebijakan ini menyatakan bahwa setiap orang yang lahir di wilayah koloni Belanda merupakan Kawula Belanda dan harus tunduk kepada Undang-Undang Kerajaan Belanda. Kebijakan ini mewajibkan setiap penduduknya atau setiap Kawula Belanda untuk melakukan wajib militer, kewajiban militer ini wajib dilakukan oleh setiap Kawula Belanda

untuk memperkuat pertahanan pemerintah Hindia Belanda. Kegiatan wajib militer ini bagi etnis Cina merupakan kebijakan yang bersifat memaksa dan bersifat sewenang-wenang. Penduduk etnis Cina sendiri menentang dengan kebijakan ini karena mereka menganggap diri mereka bukan merupakan dari Kawula Belanda dan lebih mendukung nasionalisme Tiongkok yang dirasa apabila mereka mendukung nasionalisme mereka akan mendapatkan kekuatan dan bantuan dari pemerintah Kerajaan Tiongkok.

*Ketiga*, untuk mempermudah pengawasan serta pengatur masalah-masalah etnis Cina pemerintah Hindia Belanda akhirnya mengangkat seorang pemimpin dari etnis Cina sendiri yang kemudian dikenal dengan nama opsir Cina. Lembaga opsir Cina resmi didirikan dengan pengangkatan serta pelantikan kapiten Cina pertama yakni Souw Beng Kong. Lembaga opsir Cina terdiri dari mayor Cina, kapiten Cina dan letnan Cina. Mayor Cina merupakan kedudukan tertinggi dalam struktur organisasi lembaga opsir Cina yang tugasnya adalah mengawasi wilayah atau distrik yang lebih luas dibanding seorang kapiten ataupun letnan Cina. Seorang mayor Cina dalam menjalankan tugasnya ia bertanggung jawab langsung kepada kepala distrik dan pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan seorang kapiten Cina dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang letnan Cina dan bertanggung jawab langsung terhadap mayor Cina, mereka lebih mengurus mengenai administrasi penduduk etnis Cina seperti pernikahan, kematian, perceraian dan administrasi lainnya.

*Keempat*, para opsir Cina dalam menjalankan tugasnya tidak mengatur ataupun mengawasi kehidupan etnis Cina saja akan tetapi mereka juga bertugas sebagai pegawai penarik pajak kepada penduduk. Walaupun trayek penarikan pajak dilakukan secara lelang oleh pemerintah Hindia Belanda, seorang pejabat opsir Cina mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan trayek tersebut karena mereka mempunyai kekayaan yang banyak serta memiliki kedekatan dengan pemerintah Hindia Belanda.

Mengemban tugas sebagai penarik pajak, seorang pejabat opsir Cina mempunyai kesempatan untuk tetap mempertahankan kedudukannya secara turun temurun seperti halnya kekayaan yang mereka miliki. Kedudukan lembaga

opsir Cina secara perlahan mulai dihapuskan terutama di daerah Jawa dan Madura kecuali daerah Batavia karena penduduk etnis Cina menganggap bahwa mereka tidak lagi mewakili aspirasi dan hanya mementingkan kepentingan mereka dengan memperkaya diri sendiri. Untuk daerah Batavia posisi opsir Cina masih tetap dipertahankan sampai pergantian pemerintahan ke tangan Jepang, hal ini karena memang pemerintah Hindia Belanda masih membutuhkan jasa mereka untuk mengurus urusan administrasi etnis Cina.

Pemerintah Hindia Belanda dalam menjalankan pengawasan semua urusan administrasi dan kependudukan masyarakat etnis Cina menyerahkan tugas tersebut sepenuhnya kepada wakil mereka dalam pemerintahan yakni seorang Opsir Cina. Opsir Cina ini selain melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang dipimpinnya ia juga harus menjaga nama baik kelompoknya serta menjaga hubungan baik antara masyarakat etnis Cina dengan masyarakat Batavia lainnya. Seorang opsir Cina selain itu juga menjadi wakil masyarakat etnis Cina dalam pemerintahan, ia harus mendengarkan dan menyampaikan semua aspirasi masyarakat yang diwakilinya kepada pemerintah Hindia Belanda.

### **Rekomendasi**

Untuk pemerintah yang terkait, dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat lebih mengerti serta memahami peran etnis Cina dalam pembangunan bangsa ini sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda terutama peran mereka dalam dunia perdagangan. Selain itu lebih bisa menghargai peranan etnis Cina sendiri dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan sebaiknya pemerintah tidak lagi mengeluarkan peraturan ataupun perlakuan yang bersikap diskriminatif terhadap kepentingan-kepentingan etnis Cina. Karena dengan adanya sikap dan kebijakan yang bersifat diskriminasi menumbuhkan sifat-sifat antipati dan sikap anti Cina yang sering terjadi di negara ini sejak pemerintahan Kompeni Belanda. Sebaiknya pemerintah lebih bisa memberikan kesempatan terhadap etnis Cina untuk bisa mengabdikan diri terhadap bangsa ini.

Untuk masyarakat dan kaum akademisi, dengan adanya skripsi ini diharapkan bisa memberikan pemahaman mengenai kehidupan etnis Cina pada

masa pemerintahan Hindia Belanda dan sebaiknya kita bisa bersikap terbuka dan mau membuka diri terhadap etnis Cina serta kita lebih memahami sikap serta sifat yang diwarisi oleh mereka dan tidak membeda-bedakan seseorang hanya karena perbedaan Ras, Agama dan Suku. Kita adalah satu, satu warga negara yaitu Indonesia yang multikultural.

Untuk penelitian selanjutnya penulis menyadari keterbatasan informasi serta keterbatasan sumber dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai opsir Cina yang ada di Hindia Belanda terutama yang ada di Batavia dengan menggunakan sumber yang lebih banyak dan lebih diperkaya dengan sumber arsip. Serta dalam penelitian ini belum dibahas lebih mendalam mengenai hubungan yang lebih mendalam antara pemerintah Hindia Belanda dengan pemerintahan Kekaisaran Cina yang dapat menentukan kehidupan etnis Cina di Batavia.

Adapun untuk pembelajaran Sejarah di sekolah terutama untuk siswa-siswi Sekolah Menengah Atas (SMA), skripsi ini diharapkan bisa memberikan pemahaman terhadap siswa mengenai bahwa dari awal pemerintahan Hindia Belanda sampai pergantian pemerintahan dari pemerintah Hindia Belanda kepada Jepang, etnis Cina memiliki kontribusi dalam pembangunan bangsa Indonesia terutama bagi Ibu Kota Negara Indonesia yakni Batavia yang sekarang sudah berubah nama menjadi Jakarta dalam bidang perekonomian terutama perdagangan. Etnis Cina juga merupakan bagian dari sejarah Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dari kontribusi mereka terhadap kemerdekaan, serta memberikan pemahaman kepada siswa bahwa lembaga opsir Cina merupakan bagian dari struktur pemerintahan Hindia Belanda dan juga merupakan perwakilan dari golongannya dalam dunia politik Hindia Belanda. Sesuai dengan SK 2 : menganalisis perkembangan bangsa Indonesia sejak masuknya pengaruh Barat sampai dengan pendudukan Jepang, dengan KD 2.1: Menganalisis perkembangan pengaruh Barat dan perubahan Ekonomi, demografi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia pada masa kolonial. Terutama materi mengenai Perkembangan Kehidupan Masyarakat pada Masa Kolonial.